

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam undang-undang tersebut diatur pula bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2020 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang selama bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan 2020.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

20. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2020 ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, mewujudkan pencapaian target kinerja Daerah, dan optimalisasi pemanfaatan pendapatan/ penerimaan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, hasil evaluasi tahun berkenaan sehingga di butuhkan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat triwulan II Tahun 2020

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II sampai dengan bulan Juni 2020.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (sesuai dengan format E.81). Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Berisikan uraian mengenai :

V.I-6

1. Proses yang dilakukan yaitu mereview capaian Renja membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan penambahan anggaran
2. Penjelasan mengenai alasan proses penambahan anggaran dilakukan
3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah (dituliskan pada catatan penting)
4. Lampiran tabel berikut, Tabel 2.2

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2020

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2020. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (sesuai dengan format E.81). Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan II (30 Juni) anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2020 sebesar Rp. 1.826.243.981,00 Secara ringkas realisasi pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2020 hingga triwulan II ditunjukkan pada tabel Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Adapun program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja yang direncanakan sampai dengan Triwulan II adalah :

- a. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
 - 1) Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana
Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV.
- b. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana
 - 1) Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III.

- c. Program Pelayanan Kesekretariatan
 - 1) Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana
Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III.
 - 2) Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV.
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor
Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV.

- 2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;
 - a. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
 - 1) Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana
Tidak tercapainya kegiatan Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana disebabkan masih surplusnya cadangan logistik yang ada.
 - b. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
 - 1) Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
Tidak tercapainya kegiatan Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disebabkan karena tim kerja jitu pasna sulit dibentuk karena ada permasalahan terkait aspek legalitas dan biaya operasional, untuk itu penyusunan dokumen kajian pascabencana dilaksanakan setelah perubahan rencana penyerapan dokumen anggaran.
 - c. Program Pelayanan Kesekretariat
 - 1) Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana
Tidak tercapainya kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana disebabkan karena adanya perubahan item-item pengadaan.

2) Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tidak tercapainya kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dikenakan ada perubahan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan.

3) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor

Tidak tercapainya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor disebabkan karena adanya kejadian bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan pergeseran Anggaran.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka pada Perubahan Renja tahun 2020 perlu dilakukan:

- 1) Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
- 2) Dalam penyusunan jadwal kegiatan perlu di perhatikan faktor eksternal.

V.II-10

Tabel 2.1

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2020

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPd:

Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Pencapaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
1	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	5%	1.519.357.000	28%	1.089.325.240	10%	798.338.500	179.684.500	13,85%	215.648.500					13,85%	395.333.000	138,50%	49,52%		1.484.658.240		97,72%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	150.000.000	1 Dokumen	117.392.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1 Dokumen	117.392.000	100,00%	78,26%		
		Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	60 Titik Longsor	236.375.000	-	116.269.000	57 Kelurahan	63.729.500	57 Kelurahan	42.434.500	-	12.960.500					57 Kelurahan	55.395.000	100,00%	86,92%	57 Kel	171.664.000	0,00%	72,62%	
		Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	1000 Orang	188.000.000	5000 Orang	143.350.000	200 Orang	203.665.000	200 Orang	65.795.000	-	66.410.000					200 Orang	132.205.000	100,00%	64,91%	5200 Orang	275.555.000	520,00%	146,57%	
		Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	225 Orang	150.000.000	225 Orang	91.600.000	225 Orang	138.999.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	225 Orang	91.600.000	100,00%	61,07%	
		Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	16 kelurahan	794.982.000	16 kelurahan	620.714.240	5 kelurahan	391.945.000	3 Kelurahan	71.455.000	2 Kelurahan	136.278.000					5 Kelurahan	207.733.000	100,00%	53,00%	21Kel	828.447.240	131,25%	104,21%	
				Rata-rata capaian kinerja (%)															60,00%	49,52%						
				Predikat kinerja															Rendah	Sangat Rendah						

V.II-11

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 Jam	2.821.735.000	32 Menit	2.194.178.910	< 1 Jam	1.029.770.000	45 Menit	118.600.000	55 Menit	222.000.000	-	-	50 Menit	340.600.000	120,00%	33,08%		2.534.778.910			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	295 Orang	258.955.000	295 Orang	244.184.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	295 Orang	244.184.500	100,00%	94,30%	
Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	31 Orang	1.070.445.000	24 Orang	794.397.000	26 orang	867.250.000	23 orang	118.600.000	25 orang	222.000.000	-	-	25 orang	340.600.000	96,15%	39,27%	49 Orang	1.134.997.000	74,19%	158,06%	
Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	13 Jenis	687.405.000	8 jenis	643.035.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8 Jenis	643.035.000	61,53%	93,55%	
Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	335 Orang	250.870.000	335 Orang	169.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	335 Orang	169.600.000	100,00%	67,60%	
Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 Paket bahan bangunan, 207 paket sembako, 190 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan bencana	420.915.000	1 Paket bahan bangunan, 207 paket sembako, 190 paket family kit	322.549.710	4 Jenis	162.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7 Jenis	322.549.710	175,00%	76,63%	
Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 Sarana Prasarana	133.145.000	-	20.412.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	20.412.700	0,00%	15,33%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																16,03%	33,08%					
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pascabencana	30%	1.977.623.000	29%	1.867.784.375	30%	1.167.961.900	-	60.392.500	17,65%	465.813.900	-	-	17,65%	526.206.400	58,83%	45,05%		2.393.990.775		121,05%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 Dokumen	143.745.000	-	131.653.848	1 dokumen	106.684.000	-	15.580.000	-	8.830.000	-	-	-	24.410.000	0,00%	22,88%	-	156.063.848	0,00%	108,57%	

V.II-12

		Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	8 Pekerjaan Fisik	788.279.500	8 Pekerjaan Fisik	741.253.165	4 pekerjaan fisik	492.265.900	-	23.312.500	4 pekerjaan fisik	290.599.900					4 pekerjaan fisik	313.912.400	100,00%	63,77%	12 pekerjaan fisik	1.055.165.565	150,00%	133,86%
		Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	7 Pekerjaan Fisik	791.598.500	7 Pekerjaan Fisik	763.733.500	4 pekerjaan fisik	569.012.000	-	21.500.000	5 pekerjaan fisik	166.384.000					5 pekerjaan fisik	187.884.000	125,00%	33,02%	12 pekerjaan fisik	951.617.500	171,00%	120,21%
		Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	1 Dokumen	115.000.000	-	108.880.053	-	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	-	108.880.053	0,00%	94,68%
		Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan masyarakat	60 KK	139.000.000	60 KK	122.263.809	-	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	-	122.263.809	0,00%	87,96%
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	45,00%	45,05%				
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP	100%	2.634.690.000	95,26%	1.828.288.075	78	1.677.363.400	-	194.644.136	-	369.460.445					-	-	564.104.581	-	33,63%	2.392.392.656	90,80%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1300 Surat	67.120.000	1350 Surat	60.634.500	1300 surat	125.800.000	900 Surat	11.718.000	327 surat	31.437.000					1.227 Surat	43.155.000	94,38%	34,30%	2527 Surat	103.789.500	194,38%	154,63%
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpn Air dan Listrik	12 bulan	85.000.000	12 bulan	67.735.699	12 bulan	95.000.000	3 bulan	14.158.536	3 bulan	16.830.145					6 bulan	30.988.681	50,00%	32,62%	18 Bulan	98.724.380	150,00%	116,15%
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	23 Unit	194.300.000	-	328.500	23 Unit	82.709.100					23 Unit	83.037.600	100,00%	42,74%	23 Unit	83.037.600	0,00%	0,00%
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	76.880.000	100 m2	75.955.000	100 m2	81.900.000	100 m2	17.640.000	100 m2	26.994.000					100 m2	44.634.000	100,00%	54,50%	100 m2	120.589.000	100,00%	156,85%

V.II-13

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	5.000.000	8 jenis	4.775.000	8 jenis	5.000.000	-	-	6 Jenis	3.168.000					6 Jenis	3.168.000	75,00%	63,36%	14 Jenis	7.943.000	175,00%	158,86%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	5.000.000	2 jenis	4.470.000	2 jenis	4.800.000	2 Jenis	1.060.000	2 Jenis	1.065.000					2 Jenis	2.125.000	100,00%	44,27%	4 Jenis	6.595.000	200,00%	131,90%
Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1.055 Kotak	50.000.000	685 Kotak	21.575.000	8.900 Kotak	225.600.000	760 Kotak	22.384.000	700 Kotak	23.850.000					1460 Kotak	46.234.000	16,40%	20,49%	2515 Kotak	67.809.000	238,38%	135,62%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	399.976.500	56 Kali	393.704.576	30 kali	171.245.050	13 Kali	72.452.600	14 kali	53.232.200					27 kali	125.684.800	90,00%	73,39%	87 Kali	519.389.376	145,00%	129,85%
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	70.880.000	2 Orang	70.155.000	2 Orang	73.600.000	2 Orang	11.760.000	2 Orang	23.520.000					2 Orang	35.280.000	100,00%	47,93%	4 Orang	105.435.000	200,00%	148,75%
Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	11 Jenis	162.220.800	11 Jenis	157.455.800	4 Jenis	16.500.000	1 Jenis	322.500	-	-					1 Jenis	322.500	5,26%	1,95%	12 jenis	157.778.300	109,09%	97,26%
Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 17 jenis barang modal	710.000.000	1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 16 jenis barang modal	285.937.000	11 Jenis	190.850.250	-	-	1 Jenis	29.700.000					1 Jenis	29.700.000	9,10%	15,56%	4 jenis	315.637.000	133,33%	44,46%
Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	-	-	-	-	25 Orang	144.040.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	#DIV/0!
	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%		90,83%		90%		80,00%		80,00%						80,00%		88,89%					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	350.000.000	1 gedung	116.318.000	-	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	1 Gedung	116.318.000	50,00%	33,23%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 Unit	393.512.700	15 Unit	332.571.000	23 unit	150.870.000	-	8.820.000	7 Unit	40.465.000					7 Unit	49.285.000	30,43%	32,67%	22 Unit	381.856.000	146,66%	97,04%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan sarana prasarana yang dipelihara	18 jenis	61.335.000	18 jenis	60.728.500	17 jenis	40.000.000	-	-	-	250.000					-	250.000	0,00%	0,63%	18 Jenis	60.978.500	100,00%	99,42%

V.II-14

		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		83,33%		100%		85,00%		85,00%					85,00%		85,00%						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	43.000.000	8 Dokumen (RKA,DPA, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Profil, Evaluasi Kinerja, PRKA, DPPA)	35.874.000	9 jenis dokumen	48.948.100	4 Jenis dokumen	1.800.000	2 Jenis dokumen	6.730.000				6 Jenis dokumen	8.530.000	66,66%	17,43%	14 Dokumen	44.404.000	175,00%	103,27%	
	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	4 Dokumen	116.000.000	4 Dokumen	106.839.000	1 dokumen	71.910.000	-	9.880.000	-	15.070.000				-	24.950.000	0,00%	34,70%	4 Dokumen	131.789.000	100,00%	113,61%	
	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	38.765.000	1 Dokumen	33.560.000	1 dokumen	37.000.000	1 Dokumen	22.320.000	-	14.440.000				1 Dokumen	36.760.000	100,00%	99,35%	2 Dokumen	70.320.000	200,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	55,56%	33,63%						
Predikat kinerja																	Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								4.673.433.800		553.321.136		1.272.922.845					1.826.243.981							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7																	44,15%	40,32%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

1. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu penting terhadap penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2020 Walikota Malang telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga dalam rangka penanganan wabah COVID-19 ini segala sumber daya yang ada di Pemerintah Kota Malang baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia di fokuskan untuk menangani Wabah ini. Berkenaan dengan hal tersebut dikucurkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada BPBD senilai Rp. 217.000.000,00 Sebagai dana operasional penanganan COVID-19. Selanjutnya setelah proses realokasi APBD Kota Malang sesuai instruksi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri maka BPBD Kota Malang mengajukan kembali dana Belanja Tidak Terduga (BTT) ke Walikota Malang untuk Penyediaan Makanan dan Minuman senilai Rp 492.080.000,00 untuk penyediaan Peralatan dan Perlengkapan senilai Rp. 328.690.000,00. Dana kegiatan Operasional PSBB senilai Rp. 242.349.000,00 dana untuk kegiatan Operasional Check Point sebesar Rp. 725.400.000,00 dan untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 senilai Rp. 83.400.000,00 serta Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarpras Kesehatan pada Dinas Kesehatan, tempat cuci tangan di pasar pada Dinas Kopindag, peti pemakaman pada Dinas DLH senilai Rp. 3.626.577.000,00.

2. Lampirkan tabel berikut, Tabel 2.2:

TABEL 2.2
ANALISA KEBUTUHAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

No.	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Langsung				6.586.053.750,00	1.826.243.981,00	Belanja Langsung			4.673.433.800,00		
	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya				2.288.009.750,00	564.104.581,00	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			1.677.363.400,00		
	Penanggulangan Bencana Daerah				4.298.044.000,00	1.262.139.400,00	Penanggulangan Bencana Daerah			2.996.070.400,00		
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	10%	13,85%	1.075.934.000,00	395.333.000,00	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	10%	798.338.500,00		
	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	-	138.800.000,00	-	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	-	-	Kegiatan dihapuskan karena kebijakan pemotongan Anggaran untuk realokasi untuk COVID-19	
	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	57 Kelurahan	57 Kelurahan	69.125.000,00	55.395.000,00	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	57 Kelurahan	63.729.500,00		
	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	200 Orang	200 Orang	203.665.000,00	132.205.000,00	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	200 Orang	203.665.000,00		
	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	225 Orang	-	138.999.000,00	-	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	225 Orang	138.999.000,00		
	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan masyarakat tangguh bencana yang terbentuk	5 kelurahan	5 Kelurahan	525.345.000,00	207.733.000,00	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan masyarakat tangguh bencana yang terbentuk	5 kelurahan	391.945.000,00		

V.II-17

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana				1.753.810.000,00	340.600.000,00	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			1.029.770.000,00	
	Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam	50 Menit				Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam		
Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	345 orang	-	434.350.000,00	-	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	-	-	Kegiatan dihapuskan karena kebijakan pemotongan Anggaran untuk realokasi untuk COVID-19
Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	31 orang	25 orang	981.250.000,00	340.600.000,00	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	26 orang	867.250.000,00	
Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	3 jenis	-	42.840.000,00	-	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	-	-	Kegiatan dihapuskan karena kebijakan pemotongan Anggaran untuk realokasi untuk COVID-19
Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang 100%	-	61.250.000,00	-	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	- 100%	-	Kegiatan dihapuskan karena kebijakan pemotongan Anggaran untuk realokasi untuk COVID-19
Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	4 Jenis	-	162.520.000,00	-	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	4 Jenis	162.520.000,00	
Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 sarana prasarana	-	71.600.000,00	-	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	-	-	Kegiatan dihapuskan karena kebijakan pemotongan Anggaran untuk realokasi untuk COVID-19
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana				1.468.300.000,00	526.206.400,00	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			1.167.961.900,00	
	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pascabencana	30%					Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pascabencana	30%		
Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	-	139.624.000,00	24.410.000,00	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	106.684.000,00	

V.II-18

Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 pekerjaan fisik	4 pekerjaan fisik	508.137.000,00	313.912.400,00	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 pekerjaan fisik	492.265.900,00	
Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana	4 pekerjaan fisik 30%	5 pekerjaan fisik	578.475.000,00	187.884.000,00	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana	4 pekerjaan fisik 30%	569.012.000,00	
Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	1 dokumen	-	130.704.000,00	-	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	-	-	Kegiatan dihapuskan karena kebijakan pemotongan Anggaran untuk realokasi untuk COVID-19
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK	-	111.360.000,00	-	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	-	-	Kegiatan dihapuskan karena kebijakan pemotongan Anggaran untuk realokasi untuk COVID-19
Program Pelayanan Kesekretariatan				2.288.009.750,00	564.104.581,00	Program Pelayanan Kesekretariatan			1.677.363.400,00	
Penyediaan jasa surat menyurat	Nilai Survey Kepuasan Internal jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	80 1300 surat		131.800.000,00	43.155.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Nilai Survey Kepuasan Internal jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	80 1300 surat	125.800.000,00	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	6 bulan	95.000.000,00	30.988.681,00	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	95.000.000,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	23 Unit	23 Unit	194.300.000,00	83.037.600,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	23 Unit	194.300.000,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	100 m2	93.600.000,00	44.634.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	81.900.000,00	

V.II-19

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	6 Jenis	5.000.000,00	3.168.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	5.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 Jenis	4.800.000,00	2.125.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	4.800.000,00	
Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	11.000 Kotak	1.460 Kotak	275.100.000,00	46.234.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	8.900 Kotak	225.600.000,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	27 kali	313.000.500,00	125.684.800,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 kali	171.245.050,00	
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang	2 Orang	85.600.000,00	35.280.000,00	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang	73.600.000,00	
Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	19 Jenis	1 Jenis	162.000.000,00	322.500,00	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	4 Jenis	16.500.000,00	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	16 Jenis	1 Jenis	259.119.250,00	29.700.000,00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	11 Jenis	190.850.250,00	
Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	37 Orang	-	144.040.000,00	-	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	25 Orang	144.040.000,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	90%					Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	90%		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	100m2	-	150.000.000,00	-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	-	-	Kegiatan dihapuskan karena kebijakan pemotongan Anggaran untuk realokasi untuk COVID-19
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	23 unit	7 Unit	156.870.000,00	49.285.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	23 unit	150.870.000,00	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 jenis	-	40.000.000,00	250.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 jenis	40.000.000,00	

V.II-20

	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%					Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 jenis dokumen	6 Jenis dokumen	50.000.000,00	8.530.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 jenis dokumen	48.948.100,00	
Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	1 dokumen	-	88.580.000,00	24.950.000,00	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	1 dokumen	71.910.000,00	
Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	1 Dokumen	39.200.000,00	36.760.000,00	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	37.000.000,00	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2020	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2020	PAGU ANGGARAN (Rp)			Status (Tetap/Berubah/Baru/Hapus)	Lokasi	Kelompok Sasaran	Keterangan
											Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Belanja Langsung			6.586.053.750,00	4.673.433.800,00	(1.912.619.950,00)				
								Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			2.288.009.750,00	1.677.363.400,00	(610.646.350,00)				
								Penanggulangan Bencana Daerah			4.298.044.000,00	2.996.070.400,00	(1.301.973.600,00)				
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	Jumlah masyarakat sadar bencana dibagi jumlah masyarakat usia produktif di kali 100%	0,67%	4	5	1	15	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	10%	1.075.934.000,00	798.338.500,00	(277.595.500,00)				
				4	5	1	15	1 Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	-	138.800.000,00	-	(138.800.000,00)	HAPUS	Jawa Timur - Kota Malang		
				4	5	1	15	2 Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	57 Kelurahan	69.125.000,00	63.729.500,00	(5.395.500,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang		
				4	5	1	15	3 Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	200 Orang	203.665.000,00	203.665.000,00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang		
				4	5	1	15	4 Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	225 Orang	138.999.000,00	138.999.000,00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang		
				4	5	1	15	5 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 kelurahan	525.345.000,00	391.945.000,00	(133.400.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang		

V.III-23

	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai respon time	Jumlah korban yang tertangani sesuai respond time dibagi jumlah seluruh korban dikali 100%	100%	4	5	1	16		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam		1.753.810.000,00	1.029.770.000,00	(724.040.000,00)		
				4	5	1	16	1	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	-		434.350.000,00	-	(434.350.000,00)	HAPUS	Jawa Timur - Kota Malang
				4	5	1	16	2	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	26 orang		981.250.000,00	867.250.000,00	(114.000.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang
				4	5	1	16	3	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	-		42.840.000,00	-	(42.840.000,00)	HAPUS	Jawa Timur - Kota Malang
				4	5	1	16	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	-		61.250.000,00	-	(61.250.000,00)	HAPUS	Jawa Timur - Kota Malang
										Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%						
				4	5	1	16	5	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	4 Jenis		162.520.000,00	162.520.000,00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang
				4	5	1	16	6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	-		71.600.000,00	-	(71.600.000,00)	HAPUS	Jawa Timur - Kota Malang

V.III-24

	persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah penanganan kejadian pascabencana dibagi seluruh kejadian pascabencana yang seharusnya ditangani dikali 100%	30%	4	5	1	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pascabencana	30%	1.468.300.000,00	1.167.961.900,00	(300.338.100,00)			
				4	5	1	17	1	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	139.624.000,00	106.684.000,00	(32.940.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	17	2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 pekerjaan fisik	508.137.000,00	492.265.900,00	(15.871.100,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	17	3	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 pekerjaan fisik	578.475.000,00	569.012.000,00	(9.463.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang	
										Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana	30%						
				4	5	1	17	4	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	-	130.704.000,00	-	(130.704.000,00)	HAPUS	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	17	5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	-	111.360.000,00	-	(111.360.000,00)	HAPUS	Jawa Timur - Kota Malang	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	78	4	5	1	7		Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Survey Kepuasan Internal	80	2.288.009.750,00	1.677.363.400,00	(610.646.350,00)			
				4	5	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1300 surat	131.800.000,00	125.800.000,00	(6.000.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang	

V.III-25

					4	5	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	95.000.000,00	95.000.000,00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	23 Unit	194.300.000,00	194.300.000,00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	93.600.000,00	81.900.000,00	(11.700.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	42	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	4.800.000,00	4.800.000,00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	8.900 Kotak	275.100.000,00	225.600.000,00	(49.500.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 kali	313.000.500,00	171.245.050,00	(141.755.450,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	45	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang	85.600.000,00	73.600.000,00	(12.000.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	4 Jenis	162.000.000,00	16.500.000,00	(145.500.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	64	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	11 Jenis	259.119.250,00	190.850.250,00	(68.269.000,00)	BERUBAH	Jawa Timur - Kota Malang
					4	5	1	7	72	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	25 Orang	144.040.000,00	144.040.000,00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang

BAB IV
PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Bahwa Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Malang disusun dengan asumsi dasar bahwa Wabah COVID-19 akan berakhir pada bulan Juli Tahun 2020.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN


Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD ini adalah implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Renstra Perangkat Daerah yang menjadi acuan dari Rencana Kerja (Renja) sudah disusun dengan memperhatikan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB);

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sisa Anggaran penyerapannya dimaksimumkan di Triwulan III dan IV dengan mempertimbangkan berakhirnya Wabah COVID-19.
2. Kegiatan yang melibatkan partisipasi banyak orang akan dimodifikasi dengan mengurai jumlah peserta yang ada dan menerapkan protokol kesehatan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA MALANG



Dr. ALI M. Mulyanto, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660202 198602 1 005